

**STRATEGI KOPERASI SYARIAH DALAM MENDORONG
PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA**

Arif Pujiyono, SE, MSi dan Siti Mutmainah, SE, MSi, Akt
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro Semarang
Email: arifpujiyono@undip.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara agraris dengan berbagai potensi produk pertanian unggulan baik hayati maupun heani. Meskipun pertanian memiliki kontribusi besar bagi industri, menyerap banyak tenaga kerja dan penyumbang devisa, ternyata pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDB masih rendah. Hal ini disebabkan strategi pembangunan ekonomi yang lebih difokuskan pada sektor industri dan lemahnya institusi pendukung pertumbuhan sektor pertanian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menetapkan strategi Koperasi Syariah (Kopsyah) dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif menggunakan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT). Berdasarkan hasil penelitian kekuatan utama Kopsyah adalah sumberdaya manusia yang memadai dan militan, pelayanan yang baik, mampu menjangkau pelosok desa, produk pembiayaan syariah untuk pertanian yang bervariasi. Kelemahan Kopsyah adalah anggota banyak yang tidak memahami produk pembiayaan syariah, modal Kopsyah yang masih sedikit, infrastruktur Kopsyah yang masih lemah. Peluang Kopsyah adalah banyak peraturan yang mendukung Kopsyah, banyak lembaga keuangan lain untuk sinergi dalam permodalan, sistem keuangan yang berbasis bagi hasil dan margin keuntungan yang lebih adil, perkembangan teknologi informasi untuk mendukung sistem online. Ancaman Kopsyah adalah belum adanya Undang-Undang Koperasi Syariah, banyak masyarakat petani yang belum mengenal konsep keuangan syariah, dan banyak Lembaga Keuangan besar yang memasuki sektor pertanian. Strategi untuk meningkatkan peran Kopsyah untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian adalah: merevitalisasi koperasi petani menjadi koperasi syariah yang modern termasuk di luar Jawa; meningkatkan program kerja sama dan magang dengan institusi pendidikan dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM; menganekaragamkan produk keuangan untuk sektor pertanian; menerbitkan UU dan peraturan pendukung lain yang spesifik untuk eksistensi Kopsyah; memanfaatkan kekuatan tawar produk pertanian unggulan untuk pasar ekspor; bersinergi dengan lembaga keuangan syariah lain untuk meningkatkan modal, sistem informasi (IT) dan keuangan

Kata kunci: pertanian, koperasi syariah, SWOT.

Latar Belakang

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sangat penting. Ukuran sektor pertanian memiliki kedudukan strategis dalam menyediakan

tenaga kerja, input di sektor industri dan sektor-sektor moderen lainnya. Jika mengikuti model pertumbuhan ekonomi Klasik Kuznets, maka pertanian di negara berkembang memiliki kontribusi dalam empat hal: (1) ekspansi sektor ekonomi lainnya banyak tergantung pada sektor pertanian; (2) kontribusi pasar sektor pertanian memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan sektor domestik lainnya; (3) sumber modal bagi sektor ekonomi lainnya; dan (4) kontribusi devisa terhadap perdagangan internasional melalui ekspor hasil pertanian (Tambunan, 2009)

Kebijakan makro ekonomi di Indonesia selama ini kurang berpihak pada sektor pertanian baik dari sisi pola pikir (*mind of sets change*), perilaku (*behavior change*), maupun praktik (*practical change*). Pendekatan pembangunan pertanian sebagai pembangunan multisektor kurang didukung oleh institusi terkait dengan pendekatan yang bersifat parsial/departemen. Birokasi masih memiliki pandangan bahwa sektor pertanian hanya sebagai sektor penunjang/pendukung sektor industri, bukan dikembangkan sebagai agribisnis dalam pengertian pertanian secara luas. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian relatif kurang memadai terutama di daerah pedesaan. Luas kepemilikan lahan di pedesaan yang relatif sempit (kurang 0,5 Ha) mengakibatkan petani di pedesaan kesulitan untuk mengembangkan pertanian sebagai suatu bisnis modern. Pada sisi lain, penggunaan sumberdaya daya pertanian terjadi ketimpangan, di mana di Jawa banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi bukan pertanian sementara perluasan dan pemanfaatan lahan di luar Jawa belum optimal.

Sejarah panjang pembangunan pertanian di Indonesia mengalami masa pasang surut seiring dengan perjalanan politik. Institusi terkait pertanian belum memberikan hasil pembangunan pertanian yang stabil dan berkesinambungan. Salah satu institusi pertanian yang relatif berhasil mendorong pertumbuhan pertanian khususnya pangan adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Keberhasilan swasembada pangan pada tahun 1984, setidaknya merupakan peran KUD. Sejatinya KUD memang dibentuk dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan. Dalam dinamikanya peran KUD semakin redup seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah yang lebih mengarah pada industri. Pada sisi lain citra koperasi semakin buruk terkait dengan berbagai kasus yang menimpa. Upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi oleh berbagai pihak harus kembali digiatkan agar khususnya untuk mendorong sektor pertanian.

Seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, Koperasi Syariah, yang di Indonesia lebih dikenal dengan *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, telah

memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun belum ada jumlah akurat BMT karena banyak tersebar dan memiliki badan hukum yang berbeda-beda, Indonesia merupakan pusat keuangan mikro syariah (Beik, 2008) yang berpotensi untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil termasuk di sektor pertanian. Sebagai bentuk Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi Syariah, memiliki tantangan yang berat untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah bagaimana strategi Koperasi Syariah dalam mendorong pertumbuhan pertanian di Indonesia?

Telaah Literatur

Pertanian dan Pembangunan Ekonomi

Pertanian dalam konsep pendapatan nasional menurut lapangan usaha (sektor produksi) adalah pertanian dalam arti luas, yaitu subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan/kelautan. Subsektor tanaman pangan sering disebut dengan subsektor pertanian rakyat, karena tanaman pangan biasanya diusahakan oleh rakyat. Subsektor ini mencakup komoditas-komoditas bahan makanan padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Subsektor perkebunan dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Subsektor kehutanan terdiri dari kegiatan penebangan kayu, pengambilan hasil hutan lain dan perburuan. Subsektor peternakan mencakup kegiatan beternak itu sendiri dan pengusahaan hasil-hasilnya. Subsektor perikanan meliputi semua hasil kegiatan perikanan laut, perairan umum, kolam, tambak, sawah dan keramba serta pengolahan atas produk perikanan (Dumairy, 1996).

Permasalahan pertanian di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan penanganan serius dengan melibatkan berbagai pihak. Permasalahan pertanian di Indonesia setidaknya adalah: (1) penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya lahan pertanian; (2) rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang pertanian; (3) Rendahnya produktifitas, daya saing, efisiensi dan kontinuitas produk pertanian; (4) Lemahnya kelembagaan dan mata rantai input dan output produk pertanian, dan (5) Lemahnya akses layanan permodalan untuk meningkatkan skala usaha pertanian. Permasalahan yang ada ini tentunya tidak mudah diselesaikan apalagi dengan cara instan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang strategis dan berkesinambungan agar

pertanian di Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan, stabil dan berkesinambungan.

Dalam dinamika pembangunan ekonomi modern, pertanian tidak harus diidentikkan dengan keterbelakangan, ketertinggalan dan kemiskinan. Perkembangan teknologi pertanian semakin maju, tidak hanya pengolah hasil-hasil pertanian, tetapi juga produksi pertanian mulai alat pengolah lahan pertanian, alat produksi pertanian, sampai pada bioteknologi pertanian. Meskipun perubahan struktural perekonomian mengarah pada industri dan jasa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pertanian akan kembali menjadi titik sentral pembangunan ekonomi di masa depan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terhentikan sementara kebutuhan pangan juga semakin sulit, sudah seharusnya strategi pembangunan kembali diarahkan untuk mendukung sektor pertanian. Adanya perubahan iklim dan krisis pangan mengindikasikan bahwa pertanian kembali menjadi isu pembangunan berkelanjutan.

B.2. Koperasi Syariah dan Pembangunan Pertanian

Koperasi di Indonesia telah memiliki sejarah tersendiri dalam dinamika pembangunan ekonomi di Indonesia. Secara yuridis formal, Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dalam ideologi ekonomi, koperasi merupakan soko guru perekonomian di Indonesia yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Koperasi di Indonesia memiliki keunggulan terkait dengan nilai-nilai sosiobudaya bangsa Indonesia yang penuh dengan sifat kekeluargaan, saling menolong, kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Atas dasar inilah koperasi di Indonesia memiliki potensi untuk mendukung pembangunan pertanian di Indonesia yang memiliki keunggulan posisi strategis dan iklim.

Koperasi petani memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sebagai satu kesatuan yang utuh, koperasi petani harus mampu menyediakan alat dan input proses produksi pertanian sampai pada pemasaran produk pertanian. Di banyak negara, koperasi petani terbukti sebagai model penting kewirausahaan petani kecil yang dapat mengatur dan mengoptimalkan sumber daya pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Di Amerika Serikat, meskipun merupakan basis sistem ekonomi kapital dan liberal, ternyata koperasi pertanian bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan sekitar sepertiga dari input produksi dan kredit petani, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Koperasi bertanggung jawab untuk memasarkan lebih dari 70 persen susu dan hampir 30 persen dari semua

komoditi lainnya. Kewirausahaan koperasi merupakan instrumen penting untuk membantu penduduk pedesaan menciptakan lapangan kerja dan melakukan diversifikasi sumber-sumber pendapatannya (United Nations, 2007). Sejarah lembaga keuangan mikro (termasuk koperasi) di Indonesia pada dasarnya memiliki keberhasilan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Berry dkk, 2001).

Sering dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah, di Indonesia memiliki satu lembaga keuangan mikro syariah spesifik, yang dikenal dengan nama *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT ini memiliki peran sebagai lembaga sosial (*Baitul Maal*) untuk menyalurkan dana zakat infak, sedekah, wakaf dan hadiah khususnya untuk masyarakat miskin dan peran lembaga bisnis (*Baitul Tamwil*) untuk menyalurkan dana masyarakat untuk kepentingan usaha. Secara legalisasi, BMT ini lebih sesuai berbadan hukum koperasi (Bukhory, 2009). Sesuai dengan bentuk lembaga keuangan syariah lainnya, Kopsyah juga memiliki produk keuangan syariah termasuk untuk mendukung sektor pertanian. Meskipun bukan suatu keharusan, Kopsyah ini merupakan bentuk badan hukum paling ideal untuk BMT dengan alasan (Sumiyanto, 2008): (1) sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 1945, koperasi merupakan soko guru perekonomian dengan berbagai nilai luhur dan berbagai keunggulannya; (2) BMT paling banyak diakomodasi oleh badan hukum koperasi melalui Kementerian Koperasi dan UMKM dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) serta sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM); dan (3) Koperasi Syariah banyak dibentuk oleh anggota masyarakat (sistem ekonomi kerakyatan) yang memiliki semangat dan militansi tinggi untuk menyejahterakan anggotanya.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data statistik nonparametrik, sehingga yang menjadi sampel adalah *key persons* sesuai tujuan penelitian. *Key persons* ini adalah orang-orang yang memahami tentang koperasi syariah dan pembangunan pertanian, yaitu: Pimpinan Dinas Koperasi dan UMKM, Pimpinan Dinas Pertanian, Pimpinan Asosiasi Koperasi Umum/Syariah/BMT, Akademisi dan Petani Potensial. Metode pengumpulan informasi/data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *focus group discussion* (FGD). Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan analisis *Stregth*,

Weakness, Opportunity and Threat (SWOT). Analisis SWOT merupakan suatu analisis bukan dalam bentuk angka, akan tetapi berupa keterangan, uraian pendapat maupun kesimpulan (Rangkuti, 2005). Analisis SWOT mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pengembangan Koperasi Syariah dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan *strenght-opportunity*, yang sekaligus secara bersamaan dapat meminimalkan *weakness-threat*. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang akan diambil dalam kondisi saat ini. Analisis ini merupakan strategi dalam membantu para pengambil keputusan melalui empat strategi yaitu strategi *strenght-opportunity* (SO), *weakness-opportunity* (WO), *strenght-threats* (ST), *weakness-threat* (WT).

Dalam mengadakan analisis SWOT terlebih dulu mengetahui faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang mencakup dalam matrik *external factor evaluation* (EFE) dan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang mencakup ke dalam bentuk *internal factor evaluation* (IFE). Matrik *external factor evaluation* (EFE) digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal Koperasi Syariah yang berkaitan dengan peluang dan ancaman. Data eksternal dikumpulkan untuk menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi dan persaingan pasar. *Matrik internal factor evaluation* (IFE) digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal Koperasi Syariah yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan. Data aspek internal Koperasi Syariah dapat dikumpulkan dari beberapa fungsional Koperasi Syariah, yaitu aspek sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek infrastruktur, aspek sistem informasi dan manajemen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil indepth interview dan FGD dengan Key person, maka disusunlah Matriks analisis SWOT berikut ini.

Tabel 1

Matrik Analisis SWOT Strategi Koperasi Syariah untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pertanian di Indonesia

	<p>Kekuatan (Streng):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Filosofi sesuai sosio kultur masyarakat indonesia dan idelologi ekonomi negara b. Kualifikasi SDM banyak sarjana dan militan c. Kantor dan jaringan yang tersebar dengan pelayanan yang baik d. Produk keuangan untuk sektor pertanian yang beraneka ragam 	<p>Kelemahan (Weakness):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SDM sedikit dan belum memiliki standar kualifikasi ideal dan pemahaman terkait pertanian dan produk keuangan syariah b. Modal Kopsyah yang sedikit c. Infrastruktur belum memadai dan belum terintegrasi dengan IT d. Produk keuangan untuk sektor pertanian masih sedikit
<p>Peluang (Opportunity):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan aktifitas pertanian di luar Jawa b. Masyarakat mulai sadar dengan produk keuangan syariah c. Semakin banyak perguruan tinggi yang menghasilkan sarjana ekonomi syariah d. Mekanisme bagi hasil yang lebih adil e. Perkembangan IT untuk mendukung sistem operasional online f. Banyak pelatihan dan permodalan dari instansi 	<p>Strategi SO :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi koperasi petani menjadi koperasi syariah yang modern termasuk di luar jawa 	<p>Strategi WO</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan program kerja sama dan magang dengan institusi pendidikan dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM 2. Menganekaragamkan produk keuangan untuk sektor pertanian

pemerintah untuk pengembangan koperasi		
Ancaman (Threat): a. Belum ada regulasi yang secara spesifik dan penuh mendukung pengembangan Koperasi Syariah b. Persaingan lembaga keuangan besar dengan dukungan modal besar c. Sektor pertanian yang berisiko dan sulit diprediksi akibat perubahan iklim	Strategi ST 1. Menerbitkan UU dan peraturan pendukung lain yang spesifik untuk eksistensi Kopsyah 2. Memanfaatkan kekuatan tawar produk pertanian unggulan untuk pasar ekspor	Strategi WT 1. Sinergi dengan lembaga keuangan syariah lain untuk meningkatkan modal, sistem informasi (IT) dan keuangan

Sumber: data primer, 2014 (diolah)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka strategi utama Koperasi Syariah untuk mendorong pertumbuhan kesimpulan di Indonesia ini adalah:

1. Merevitalisasi koperasi petani menjadi koperasi syariah yang modern termasuk di luar Jawa
2. Meningkatkan program kerja sama dan magang dengan institusi pendidikan dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM
3. Menganekaragamkan produk keuangan untuk sektor pertanian
4. Menerbitkan UU dan peraturan pendukung lain yang spesifik untuk eksistensi Kopsyah
5. Memanfaatkan kekuatan tawar produk pertanian unggulan untuk pasar ekspor
6. Bersinergi dengan lembaga keuangan syariah lain untuk meningkatkan modal, sistem informasi (IT) dan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

Beik, Irfan Sauqi, 2008, Snapshot Ekonomi Islam Dunia, *Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah*, Vol V, No. 1, Pebruari 2008, p.13-46.

Berry, Albert, Edgard Rodriguez & Henry Sandee, 2001, Small and Medium Enterprice Dynamics in Indonesia. *Buletin of Indonesian Economic Studies*, 37 (3), p. 63-84
Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga

Buchori, Nur S, 2009, *Koperasi Syariah*, Sidoharjo: Mashury Kelompok Masmedia Buana Pustaka

Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga

Sumiyanto, Ahmad, 2008, *BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwil dalam Format Koperasi*, Yogyakarta: Penerbit ISES Publising.

Tambunan, Tulus (2009) *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis*, Jakarta: Pustaka Kuantum.